

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Laporan Keuangan**

###### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016:7). Menurut (Fahmi, 2012:21) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Menurut (Munawir, 2010:5) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dari laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Pada laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan kondisi

perusahaan mengalami kerugian atau mengalami perkembangan dari hasil usahanya.

**b. Tujuan Pembuatan atau Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut Kasmir (Kasmir, 2016:11) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- 8) Informasi keuangan lainnya.

## 2.1.2 Kinerja Perusahaan

### a. Pengertian Kinerja Perusahaan

Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2009:165)

Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2009:22).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan kinerja perusahaan adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Informasi kinerja perusahaan terutama pada profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi tersebut juga dapat berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya yang dimiliki (Kuslinah, 2015).

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai

seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo yang sudah disepakati sebelumnya. Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyalurannya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan (Kuslinah, 2015).

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Diukur dengan menggunakan alat analisis yang berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan dari satu periode ke periode berikutnya (Kuslinah, 2015)

#### **b. Penilaian Kinerja**

Menurut (Mulyadi, 2001:146) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

- 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian.

- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Meyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

#### **c. Tahap-tahap Analisis Kinerja Perusahaan**

Analisis yang digunakan analisis kinerja keuangan yaitu penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda tergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Analisis kinerja keuangan digunakan untuk mengukut prestasi yang dimiliki perusahaan. terdapat lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan satu perusahaan yaitu:

- 1) Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Tahap pertaman yaitu mereview dari laporan keuangan. Rebiew dilakukan dengan tujuan agar leporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi. Tahap ini pada akhirnya akan memberikn hasil laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Melakukan perhitungan

Tahap kedua yaitu melakukan perhitungan terhadap data pada laporan keuangan. Penerapa metode disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dari perhitungan akan memberikan kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Tahap selanjutnya yaitu melakukan perbandingan pada hasil yang telah diperoleh. Hasil hitungan yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

### **2.1.3 Good Corporate Governance**

#### **a. Pengertian Good Corporate Governance**

*Good Corporate governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountanbility*), pertanggungjawaban (*responbility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*), (Rianto, 2017:294).

*Good corporate governance* (GCG) merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan sapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011).

*Good Corporate governance* berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi demi pemangku kepentingan. *Corporate governance* merupakan suatu

tata hubungan yang seimbang (*check and balance*) antar organ perseroan (Rapat Umum pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi), antara direksi, para manajer dan para karyawan serta antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Tata hubungan ini dilaksanakan dalam suatu proses dan struktur serta dilandasi oleh prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran).

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka *corporate governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

**b. Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance***

(Rianto, 2017:294) memberikan definisi prinsip-prinsip *corporate governance* sebagai berikut:

- 1) *Transparency* adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) *Accountanbility* adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam menerapkan prinsip *accountanbility* ini, perusahaan harus menerapkan beberapa prinsip berikut:
  - a) Direksi dan karyawan mengetahui visi, misi, dan tujuan serta target-target operasional perusahaan.
  - b) Direksi dan karyawan perusahaan memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya.

- c) Uraian tugas disetiap unit usaha telah ditetapkan sejalan dengan visi-misi, dan tujuan perusahaan.
  - d) Proses pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang disepakati.
  - e) Proses *check and balance* dilakukan pada semua unit perusahaan
  - f) Sistem penilaian kinerja operasi, organisasi, dan sistem penilaian kinerja individu ditetapkan dan dievaluasi dengan baik oleh perusahaan.
  - g) Pertanggungjawaban kinerja manajemen perusahaan dilakukan secara berkala.
  - h) Hasil pekerjaan didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga perusahaan dengan baik.
- 3) *Responsibility* yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan adalah:
- a) Direksi sampai dengan karyawan paling bawah memahami peraturan perusahaan
  - b) Direksi dan karyawan menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang ditetapkan perusahaan
  - c) Proses pengambilan keputusan menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
  - d) Direksi dan karyawan bekerja sesuai standar operasional dan prosedur (SOP) yang berlaku.

- e) Setiap unit organisasi berusaha menghindari kerugian bagi perusahaan dan *stakeholder*.
- f) Direksi dan unit kerja melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur.
- 4) *Professional* bermakna bahwa perusahaan memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (*independen*), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
- 5) *Fairness* artinya terdapat keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.1 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Ada beberapa pihak yang berperan dalam penerapan *corporate governance* pada perusahaan (Tunggal, 2002) :

a) Pemegang saham dan rapat umum pemegang saham

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang mempunyai peran dalam perusahaan. *Corporate governance* yang baik harus melindungi hak-hak pemegang saham.

b) Komisaris dan direksi

Dewan komisaris merupakan faktor sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atau urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris.

c) Auditor eksternal

Tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor eksternal adalah memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan.

d) Auditor internal

Auditor internal bertanggungjawab untuk memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan sehingga membantu perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya.

e) Komite Audit

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, dan seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus, merangkap sebagai ketua komite.

f) Sekretaris perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut.

g) Manajer dan organisasional

Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Dalam menjalankan tugasnya, manajer bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup ekonomis perusahaan, memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar dan cara-cara lain serta menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

h) *Stakeholder* lainnya

*Stakeholder* lain yang dimaksudkan antara lain pemerintah dan kreditor.

**c. Manfaat *good corporate governance***

(Rianto, 2017:67) *Stakeholders* suatu perusahaan akan menikmati dampak dari penerapan *corporate governance* di perusahaan. Jika perusahaan telah menerapkan *corporate governance* dengan sungguh-sungguh maka akan terwujud kondisi idealnya yaitu konsumen akan terjamin haknya dalam membeli barang dengan nilai dan kualitas sesuai dengan yang telah dijanjikan. Organisasional akan terlindung haknya oleh perusahaan, demikian pula rekan bisnis seperti pemasok dan distributor yang juga akan memperoleh kontrak kerja yang sesuai dan tidak dirugikan oleh perusahaan. Menurut *The Forum Good Corporate*

*Governance in Indonesia* (2009) kegunaan dari *corporate governance* yang baik adalah :

- 1) Lebih mudah memperoleh modal dan biaya modal lebih rendah
- 2) Memperbaiki kinerja usaha
- 3) Memengaruhi harga saham
- 4) Memperbaiki kinerja modal

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Meminimalkan *agency costs* dengan mengontrol konflik kepentingan *agency conflict* yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen.
- 2) Meminimalkan *costs of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal
- 3) Meningkatkan citra perusahaan
- 4) Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *costs of capital* yang rendah, peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

#### **d. Pihak yang Berperan Dalam *Good Corporate Governance***

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor, dan pemegang saham. Sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien,

menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance* (Pandya, 2011)

Organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG (Sukrisno, 2011:109), yaitu :

1) Komisaris dan Direktur Independen

Menurut Sukrisno (Sukrisno, 2011:110), terdapat dua pengertian independen yang terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut. Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suatu para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, para anggota komisaris dan direksi tersebut tentunya akan selalu berpihak kepada pemegang saham minoritas atau para pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang

dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena pertimbangan profesionalisme demi kepentingan perusahaan.

## 2) Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip good corporate governance. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan perusahaan. Anggota komite audit diharuskan mempunyai keahlian yang memadai, karena komite ini memiliki kewenangan dalam mengakses fasilitas dan data perusahaan, selain itu komite audit dituntut harus memiliki sikap yang independen. Hal ini perlu didasari dikarenakan komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Keberadaan komite audit dalam suatu perseroan terbatas untuk membantu pemberdayaan (empowerment) dewan komisaris. Oleh karena itu, pertanggungjawaban komite audit kepada dewan komisaris (Sukrisno, 2011:111)

Sebagaimana dinyatakan oleh (Sukrisno, 2011:111) tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu dewan komisaris, antara lain :

- a) Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).

- b) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).
- c) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas).
- d) Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).
- e) Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*).

Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) sebagai bagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kedudukan dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan, seperti: direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya.

Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung (*liason officer*) atau semacam *public relations/investor relations* antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, Daftar Pemegang Saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

**e. Indikator *Good Corporate Governance***

Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu:

1) Ukuran dewan komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Ukuran dewan komisaris adalah menghitung jumlah total dari anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan (Ujiyanto et al., 2007). Terdapat pandangan bahwa independensi dewan komisaris yang lebih besar lebih baik untuk meningkatkan performance perusahaan karena mereka mempunyai berbagai kemampuan yang lebih beragam dalam membantu dibuatnya keputusan-keputusan yang lebih baik. Namun, terdapat kemungkinan bahwa jumlah dewan-dewan komisaris yang banyak kurang efektif.

2) Komposisi Dewan Komisaris independen

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dewan komisaris

terdiri dari komisaris dan komisaris independen, minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.

**f. *Corporate Governance Perception Index***

*Corporate governance perception index* (CGPI) merupakan sebuah bentuk penilaian yang dihasilkan dalam bentuk pemeringkatan yang dibuat berdasarkan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan yang ada di Indonesia. Penilaian ini dilakukan melalui sebuah riset yang dibuat untuk menilai penerapan konsep *corporate governance* yang ada di sebuah perusahaan dengan melalui perbaikan yang berkesinambungan dan evaluasi melalui *benchmarking*. Di Indonesia penelitian CGPI dilaksanakan oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance*, *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) merupakan program riset dan peningkatan penerapan *good corporate governance* di Indonesia. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah salah satu inisiatif mendorong penegakan *Good Corporate Governance* di Indonesia melalui penilaian penerapan *good corporate governance* yang menuntut perusahaan terus mengembangkan dan memperbaiki

kualitas *corporate governance* dari berbagai perspektif secara berkelanjutan. Manfaat yang akan diperoleh perusahaan dalam mengikuti *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* antara lain:

- 1) Pembenahan faktor-faktor internal organisasi yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 2) Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), khususnya berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang diperlukan.
- 3) Peningkatan kesadaran bersama dikalangan internal perusahaan dan seluruh *stakeholders* terhadap urgensi dan manfaat tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan risiko ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan.
- 4) Peningkatan kepercayaan investor dan publik.
- 5) Penggunaan hasil *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 6) Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

- 7) Penataan organisasi perusahaan yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 8) Peningkatan kesadaran dan komitmen bersama dari internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam CGPI pada tahun 2012 sudah diikuti oleh perusahaan swasta, perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perbankan. Untuk menjadi peserta dari CGPI perusahaan dapat mengajukan diri sendiri, sehingga nantinya pelaksanaan CGPI, sehingga dengan adanya CGPI mendorong perusahaan untuk melakukan peningkatan praktik *corporate governance* di lingkungannya.

Hasil *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* berupa indeks persepsi *corporate governance* yang menjelaskan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* berdasarkan pemanfaatan pengetahuan dan diklasifikasikan menurut kategorisasi pemeringkatan yaitu sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya.

*Corporate Governance Perception Index (CGPI)* memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai “*The Trusted Company*” yang hasilnya disajikan di Majalah SWA sebagai liputan utama. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* juga menghasilkan laporan riset pemeringkatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

yang bersifat umum dan khusus. Laporan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* umum adalah laporan hasil program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang menyajikan hasil seluruh peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dan dipublikasikan secara luas kepada seluruh perusahaan peserta, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya sebagai bentuk akuntabilitas *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* kepada publik. Laporan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* khusus adalah laporan individual bagi perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang menyajikan hasil *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* untuk setiap peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* sebagai akuntabilitas *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* kepada peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* untuk dijadikan saah satu bahan perbaikan dan peningkatan kualitas *Corporate Governance* di lingkunganperusahannya.

**Tabel 2.1 Tahapan dan Bobot Penilaian Riset dan Pemeringkatan CGPI**

No.	Tahapan	Bobot (%)
1	<i>Self Assessment</i>	15
2	Kelengkapan Dokumen	20
3	Makalah yang merefleksikan program dan hasil penerapan GCG sebagai system di perusahaan bersangkutan	14
4	Observasi	51

(Sumber: Laporan CGPI, 2011)

Penentuan nilai penerapan *corporate governance* dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) *Self Assessment*

Pada tahap awal ini perusahaan harus mengisi *self assessment* terkait penrapan *corporate governance* yang sudah di implementasikan dalam perusahaannya.

### 2) Kelengkapan Dokumen

Pada tahap ini perusahaan harus melengkapi dokumen-dokumen terkait pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan.

### 3) Makalah

Pada tahap ini perusahaan harus melengkapi dokumen-dokumen terkait pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan.

### 4) Observasi

Dalam tahap ini peneliti CGPI akan datang langsung ke perusahaan untuk melihat secara pasti penerapan prinsip *corporate governance* di perusahaan.

Penjelasan menurut skor penerapan disajikan pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Kategori Pemeringkatan CGPI**

Skor	Level Terpercaya
55-69	Cukup Terpercaya
70-84	Terpercaya
85-100	Sangat Terpercaya

(Sumber: Laporan CGPI, 2011).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan *corporate governance* dan struktur kepemilikan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan.

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	(Widyarningsih & Wahyudi, 2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011)	(X <sub>1</sub> ) <i>Good Corporate Governance</i> (X <sub>2</sub> ) Struktur Kepemilikan (Y) Kinerja Perusahaan	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.  Struktur kepemilikan baik kepemilikan institusional ataupun kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
2.	(Giovani, 2017)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tata kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	(X <sub>1</sub> ) Struktur Kepemilikan (X <sub>2</sub> ) Tata Kelola Perusahaan (X <sub>3</sub> ) Karakteristik Perusahaan (Y) Manajemen Laba	Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.  Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba  Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

				Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.  Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.
3.	(John William & Sanjaya, 2017)	Faktr-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	(X <sub>1</sub> ) Hutang (X <sub>2</sub> ) Kepemilikan Manajerial (X <sub>3</sub> ) Ukuran Perusahaan (X <sub>4</sub> ) Umur Perusahaan (X <sub>5</sub> )Kepemilikan Institusional (X <sub>6</sub> ) Likuiditas (X <sub>7</sub> ) Tangibilitas (Y) Pertumbuhan	Hutang, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan institusional, likuiditas, tangibilitas dan pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap
4.	(Meidona & Yati, 2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit Terhadap Kinerja Kaungan pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di	(X <sub>1</sub> ) <i>Corporate Governance</i> (X <sub>2</sub> ) Kualitas Audit (Y) Kinerja Keuangan	<i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan  Kualitas Audit Berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

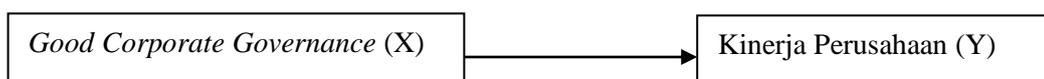
		Bursa Efek Indoneisa		<i>Corporate governance</i> dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
5.	(Ruslim & Santoso, 2018)	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, jumlah Direktur, Jumlah Komite Audit, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Manajemen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	(X <sub>1</sub> ) Proporsi Komisaris Independen (X <sub>2</sub> ) Jumlah Direktur (X <sub>3</sub> ) Jumlah Komite Audit (X <sub>4</sub> ) Kepemilikan Saham Institusional (X <sub>5</sub> ) Kepemilikan Saham Manajemen (X <sub>6</sub> ) Ukuran Perusahaan (Y) Kinerja Keuangan Perusahaan	Pengujian secara parsial proporsi komisaris independen dan kepemilikan saham institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  Pengujian secara simultan proporsi komisaris independen, jumlah direktur, jumlah komite audit, jumlah direktur, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajemen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
6.	(Nilayanti & Suaryana, 2019)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	(X <sub>1</sub> ) Kepemilikan Manajerial (X <sub>2</sub> ) Kepemilikan Institusional (Y) Kinerja Keuangan Perusahaan	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  Kepemilikan institusional

	dengan Kebijakan Deviden Sebagai Pemoderasi	(Z) Kebijakan Deviden	berpengaruh terhadap keuangan perusahaan.	positif kinerja
			Kebijakan deviden mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan dan tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.	
7.	(Hermiyetti & Katlanis, 2016)	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	(X <sub>1</sub> ) Kepemilikan Manajerial (X <sub>2</sub> ) Kepemilikan Asing (X <sub>3</sub> ) Komite Audit (Y) Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sumber: Penelitian Terdahulu Tahun 2013-2019

### 2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori maka dapat diambil kerangka berpikir dalam penelitian pada gambar :



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

## 2.4 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2017:105). Dengan adanya *good corporate governance* pada suatu perusahaan akan membuat perusahaan meningkatkan kinerjanya dengan baik melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Tidak hanya itu adanya *good corporate governance* juga berguna untuk mengatur pengelolaan dan tata pengawasan didalam perusahaan untuk mendapatkan dan memberikan kinerja perusahaan yang baik khususnya dalam bidang keuangan perusahaan.

(Melia & Yulinus, 2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan, hasilnya menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

**H = *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.**